



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/18 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 yang diajukan Walikota Semarang telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan persetujuannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasil bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dengan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang Nomor : 17/Banggar/DPRD/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Laporan Hasil Pembahasan Usulan Tambahan Penghasilan PNS Dalam KUA PPAS Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 03 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

KETUA

  
SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kota Semarang  
 Nomor : 172.1/18 Tahun 2018  
 Tanggal : 03 Agustus 2018

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	TPP TAHUN 2019	INSENTIF SETAHUN (14 KALI)	ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN (SELAIN BAPENDA), SATPOL PP DAN KECAMATAN					
1	SEKRETARIS DAERAH (ESELON II/a)	1	32,000,000	448,000,000	448,000,000
2	ASISTEN	3	25,000,000	350,000,000	1,050,000,000
3	ESELON II/b	32	22,000,000	308,000,000	9,856,000,000
4	STAF AHLI	3	20,000,000	280,000,000	840,000,000
5	ESELON III/a	67	14,500,000	203,000,000	13,601,000,000
6	ESELON III/b	138	13,500,000	189,000,000	26,082,000,000
7	ESELON IV/a	862	9,000,000	126,000,000	108,612,000,000
8	ESELON IV/b	855	7,000,000	98,000,000	83,790,000,000
9	JF (PENGAWAS PEMERINTAHAN / AUDITOR MADYA)	9	9,000,000	126,000,000	1,134,000,000
10	JF (PENGAWAS PEMERINTAHAN / AUDITOR MUDA)	6	6,500,000	91,000,000	546,000,000
11	JF (PENGAWAS PEMERINTAHAN / AUDITOR PERTAMA)	7	6,000,000	84,000,000	588,000,000
12	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN IV	140	6,500,000	91,000,000	12,740,000,000
13	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN III	2151	6,000,000	84,000,000	180,684,000,000
14	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN II	1508	4,500,000	63,000,000	95,004,000,000
15	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN I	181	4,000,000	56,000,000	10,136,000,000
16	KEPALA SEKOLAH	376	1,800,000	25,200,000	9,475,200,000
17	KORMIN	43	6,500,000	91,000,000	3,913,000,000
18	PENGAWAS SEKOLAH	109	1,800,000	25,200,000	2,746,800,000
19	GURU BERSERTIFIKASI GOLONGAN IV	2078	1,250,000	17,500,000	36,365,000,000
20	GURU BERSERTIFIKASI GOLONGAN III	1353	1,000,000	14,000,000	18,942,000,000

21	GURU BERSERTIFIKASI GOLONGAN II	160	750,000	10,500,000	1,680,000,000
22	GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN IV	9	2,700,000	37,800,000	340,200,000
23	GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN III	350	2,450,000	34,300,000	12,005,000,000
24	GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN II	174	2,000,000	28,000,000	4,872,000,000
25	CPNS GOLONGAN III		3,000,000	42,000,000	-
26	CPNS GOLONGAN II		2,500,000	35,000,000	-
27	CPNS GOLONGAN I		2,000,000	28,000,000	-

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	TPP TAHUN 2019	INSENTIF SETAHUN (14 KALI)	ANGGARAN
	RSUD				
1	ESELON II/b	1	15,000,000	210,000,000	210,000,000
2	ESELON III/a	3	9,750,000	136,500,000	409,500,000
3	ESELON III/b	5	9,000,000	126,000,000	630,000,000
4	ESELON IV/a	10	6,200,000	86,800,000	868,000,000
5	ESELON IV/b			-	-
6	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN IV	43	4,500,000	63,000,000	2,709,000,000
7	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN III	279	4,000,000	56,000,000	15,624,000,000
8	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN II	82	3,000,000	42,000,000	3,444,000,000
9	FUNGSIONAL/PELAKSANA GOLONGAN I	2	2,500,000	35,000,000	70,000,000

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	TPP TAHUN 2019	INSENTIF SETAHUN (2 KALI)	ANGGARAN
BAPENDA					
1	ESELON II/b	1	22,000,000	44,000,000	44,000,000
2	ESELON III/a	1	14,500,000	29,000,000	29,000,000
3	ESELON III/b	4	13,500,000	27,000,000	108,000,000
4	ESELON IV/a	15	9,000,000	18,000,000	270,000,000
5	FUNGSIONAL/PELAKS ANA GOLONGAN IV		6,500,000	13,000,000	-
6	FUNGSIONAL/PELAKS ANA GOLONGAN III	97	6,000,000	12,000,000	1,164,000,000
7	FUNGSIONAL/PELAKS ANA GOLONGAN II	13	4,500,000	9,000,000	117,000,000
8	FUNGSIONAL/PELAKS ANA GOLONGAN I	1	4,000,000	8,000,000	8,000,000
		11172			Rp 661,154,700,000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

KETUA

  
 SUPRIYADI